

**PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENDAPATAN  
PERKAPITA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**Made Tomy Widiarsana<sup>1</sup>**

**Luh Putu Aswitari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: widiarsanatomy@gmail.com

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas dari penelitian ini yaitu pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan bentuk data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi non partisipan, yaitu dengan cara mengamati, mencatat, mempelajari jurnal, buku-buku, dokumen skripsi, dan laporan dari sumber atau instansi yang terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Secara parsial pendapatan perkapita dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sementara secara parsial pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, Pendidikan, Tingkat Kemiskinan

**ABSTRACT**

*Poverty is a condition of life that is completely deficient experienced by a person or household so that it is unable to meet the minimum or proper needs for life. The purpose of conducting this study was to determine the effect of the independent variables of this study, namely population growth, per capita income and education on poverty levels in the regencies / cities of Bali Province. This research was conducted in Bali Province. The type of data used is quantitative data with secondary data. Data collection is carried out through non-participant observation methods, namely by observing, taking notes, studying journals, books, thesis documents, and reports from related sources or agencies. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the variables of population growth, per capita income, and education simultaneously had an effect on the level of poverty in the regencies / cities of Bali Province. Partially per capita income and education have a negative effect on the level of poverty in the regencies / cities of the province of Bali. Meanwhile, partially, population growth has a positive effect on the poverty level in the Regency / City of Bali Province*

*Keywords: Population Growth, Per capita Income, Education, Poverty Level*

**PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata

kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sering dimengerti hanya sebagai penyebab dari rendahnya pendapatan seseorang, padahal kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan dari berbagai faktor. Rendahnya kesejahteraan biasanya dijadikan ukuran kemiskinan. Ada banyak konsep dan definisi mengenai kemiskinan. Kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari paling tidak untuk makan

Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Addison, 2007). Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan mencakupi berbagai aspek kehidupan masyarakat (M. Muh Nasir et al., 2008). Kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk miskin telah menjadi perhatian dunia dan menjadi isu sentral dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan biasa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat

membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan dari pada pemasaran.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012) kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku.

Mubyarto (2004) mengatakan bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Chriswardani (2005) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga meliputi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Todaro (2000), kemiskinan ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita dan lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan.

Penduduk miskin dalam hal ini pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian.

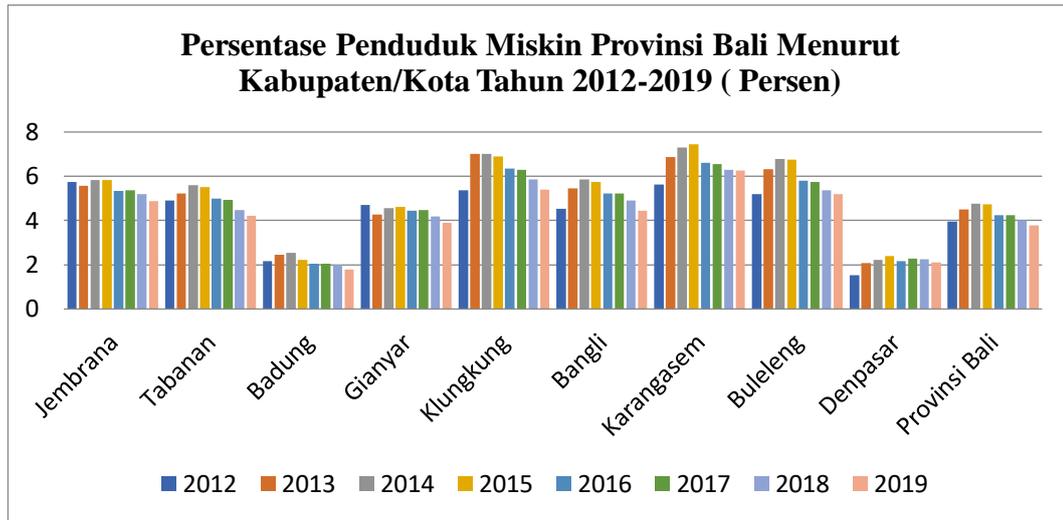
Suryawati (2005) menyatakan kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu: 1) kemiskinan absolut suatu kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi sandang, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk nasa hidup dan bekerja; 2) kemiskinan relatif: kondisi miskin dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau untuk seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; 3) kemiskinan kultural: mengacu pada sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; 4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan suatu integrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, sangat rentan terhadap ancaman tindakan kriminal, serta tidak berdayanya dalam menghadapi kekuasaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya pesat. Namun di tengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi di beberapa Kabupaten/kota. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Alit dan Suidiana, 2013).

Dari gambar yang disajikan menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sampai 2019 di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Namun dilihat dari gambar tersebut Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung memiliki rata-rata penduduk miskin baik dari segi jumlah maupun persentase yang tertinggi di Provinsi Bali. berikut terdapat persentase penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dalam gambar 1

**Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2019 ( Persen)**



Sumber: *Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Provinsi Bali, 2019*

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk. Jumlah Penduduk yang tinggi tanpa diimbangi oleh perbaikan kualitas penduduk dan peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial (Rohani, 2016). Populasi berdampak pada pembangunan ekonomi melalui ukuran populasi, tabungan, struktur buruh, kemajuan teknologi dan industrialisasi.

Ketika kualitas modal manusia angkatan kerja yang melakukan aktivitas ekonomi rendah maka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menciptakan banyak persoalan terutama pada daerah yang memiliki modal yang kurang, teknologi masih sederhana, dan tenaga kerja yang kurang ahli, oleh karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap dapat menjadi hambatan pembangunan ekonomi (Djayastra, dkk., 2016). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincolin akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2010 : 267).

Pertambahan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di negara sedang berkembang membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 2000) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan

permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan (Saputra, 2011). Pertambahan jumlah penduduk yang cepat dapat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan (Rohani, 2016).

Menurut Kuncoro (2004), pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (Bibi, 2006) Besarnya pendapatan perkapita sering digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran di berbagai daerah (Norton, 2002). Pendapatan perkapita dapat diperoleh dari tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut (Sadono Sukirno, 2004:423).

Pendapatan perkapita adalah besarnya semua pendapatan dan semua jumlah penduduk di suatu wilayah negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita dapat dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan perkapita memperlihatkan pula apakah kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.

PDRB merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui barang dan jasa oleh semua kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, Semakin tinggi PDRB disuatu wilayah, maka semakin besar pula tingkat penerimaan wilayah tersebut, Namun PDRB tidak menjamin seluruh penduduk menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya PDRB belum dapat disimpulkan apakah keadaan penduduk yang berpenghasilan rendah sudah membaik atau belum (Ahmadi, 2003:111).

Provinsi Bali dengan pendapatan PDRB yang cukup tinggi, tidak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya saja, tetapi juga bertujuan untuk pemeratan pendapatan daerah, serta mampu mensejahterakan penduduk. Berikut terdapat PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2012-2019 yang ditunjukkan pada tabel 1

**Tabel 1 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2012-2019 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	26194	28991	33432	37548	40862.31	44070	47518	50919
Tabanan	26812	30114	34770	38991	42486.32	46201	49917	53590
Badung	47305	53972	61843	68833	74933.6	81345	87985	93691
Gianyar	28272	31620	36512	40679	44261.91	48073	52130	55803
Klungkung	25435	28176	32474	36575	40249.11	43885	47473	50927
Bangli	15375	17179	19799	22218	24384.4	26551	28710	30794
Karangasem	20466	22985	26525	29932	32645.79	35362	38266	41060
Buleleng	26686	29992	34804	38951	42593.62	46387	50124	53755
Denpasar	31148	34730	39613	43633	47235.52	51226	55243	58785
Provinsi Bali	29443	33135	38099	42480	46210.7	50167	54469	58243

Sumber: *BPS Provinsi Bali 2019*

Dari tabel 1 yang disajikan mengenai kesejahteraan masyarakat Bali yang dicerminkan dalam pendapatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita di Provinsi Bali, laju pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Bali mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Namun dilihat dari tabel tersebut PDRB perkapita pada Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem masih cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali.

Selain itu yang menjadi masalah serius dalam kemiskinan adalah pendidikan, Pendidikan dikatakan mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat menambah pendapatan seseorang, Semakin tinggi pendidikan seseorang, pengetahuan dan pengalaman semakin meningkat. Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta ketertinggalan sosial ekonominya.

Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan, pendidikan adalah sebuah upaya yang memerlukan proses panjang agar seorang individu mampu berpikir dan bertanggung jawab. Hal ini membuat posisi pendidikan dalam lingkaran kemiskinan menjadi penting. Pendidikan akan membuat seseorang memiliki kecukupan hidup untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga akan membuka banyak opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam kebutuhan hidupnya. Selain itu, pendidikan saat ini masih digunakan agar salah satu kualifikasi dalam memperoleh pekerjaan, tentunya ini adalah kaitan nyata antara pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan (Anggraeni, 2017). Berikut terdapat Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dalam tabel 2.

**Tabel 2 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2019**

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	7,25	7,27	7,30	7,54	7,59	7,62	7,95	8,22
Tabanan	7,76	7,83	7,91	8,07	8,10	8,43	8,64	8,87
Badung	9,07	9,18	9,29	9,44	9,90	9,99	10,06	10,38
Gianyar	7,99	8,24	8,28	8,49	8,86	8,87	8,92	8,94
Klungkung	6,81	6,88	6,90	6,98	7,06	7,46	7,75	8,12
Bangli	6,01	6,35	6,38	6,41	6,44	6,80	7,13	7,16
Karangasem	5,22	5,34	5,39	5,42	5,48	5,52	5,97	6,31
Buleleng	6,51	6,63	6,66	6,77	6,85	7,03	7,04	7,08
Denpasar	10,82	10,90	10,96	11,02	11,14	11,15	11,16	11,23
Provinsi Bali	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84

Sumber: *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata lama sekolah Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan yang paling penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menambah pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan mendorong produktivitas kerja dan pengalaman akan semakin meningkat, sangat berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau putus sekolah. Pendidikan juga harus mendapatkan sorotan dari pemerintah agar masyarakat bisa mengejar sosial ekonominya dan meningkatkan SDM masyarakat tersebut. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena pendidikan

merupakan salah satu komponen yang terkait dalam penyebab kemiskinan (Iswara, 2014).

Pendidikan merupakan dalam berkembangnya pembangunan suatu bangsa sehingga menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dunia pendidikan dalam suatu bangsa tidak baik, maka pembangunan bangsa tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkatnya pendidikan penduduk akan meningkatkan produktifitasnya, semakin meningkat produktifitas akan semakin meningkatkan pendapatannya sehingga penduduk akan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, semakin terpenuhinya kebutuhan hidup akan mengakibatkan kemiskinan menurun.

Menurut Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat juga di sebabkan karena pendidikan yang rendah. Dimana taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Menurut Janjua (2011), pendidikan selalu dianggap sebagai alat yang dominan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan produktivitas, yang juga merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Mankiw (2012) pendidikan adalah investasi dalam modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang suatu Negara. Pendidikan tinggi dipandang sebagai sumber inovasi yang akan mendorong peningkatan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Eric, 2016). Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi kualitas tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan individu serta meningkatkan konsumsi mereka sehingga mereka terhindar dari kemiskinan (Sirilius Seran, 2017). Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar, karena pendidikan memberi kemampuan untuk berkembang lewat ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan juga menambah kesadaran untuk hidup layak dan bermartabat (Solihin, 2018).

Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara - negara berkembang (Vincent, 2009). Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik (Kembar Sri Budhi, 2013).

Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, namun pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat miskin disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah (Arndt dan Sundrum 2012). Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan

berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin (Jarnasy 2004:8).

Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, kondisi di negara-negara berkembang yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan akibat krisis, seperti peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan ( Arius Jonaidi, 2012:140).

Menurut Kornita (2009), dalam jurnal Asmara, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Namun secara garis besar kemiskinan dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Kemiskinan berhubungan dengan budaya (*culture*) yang hidup dalam masyarakat, yang biasa disebut kemiskinan culture. Dalam hal ini kemiskinan dikaitkan dengan etos kerja.
- b. Kemiskinan timbul akibat adanya ketidakadilan dalam pemilihan faktor produksi dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki akses yang kuat terhadap faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang akhirnya menyisihkan kelompok masyarakat yang kecil, akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi.

Menurut Spicker (dalam Winarendra, 2014) penyebab kemiskinan dapat dibagi kedalam 4 Mazhab yang berbeda, yaitu: 1) *Individual Explanation*, kemiskinan dalam karakteristik orang miskin itu sendiri, yaitu hasil dari kemalasan, kekurangan perorangan atau beberapa macam kekurangan atau kecacatan, seorang miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerjadan sebagainya. 2) *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjutnya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan. 3) *Subcultural explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal. 4) *Structural explanation*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan yang diinterpretasikan oleh adanya divisi sosial, kelas, status atau kekuatan.

Menurut Selo Soemarjan dalam sosiologi teks pengantar dan terapan mengemukakan bahwa strutural kemiskinan adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Secara teoritis kemiskina structural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dan dapat dicerna pada struktur sosial yang berlaku. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka kedalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun, sejalan dengan itu mereka hanya mungkin keluar dari kemiskinan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Menurut Ritonga (2003:1) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28) faktor- faktor seperti malas bekerja, keterbatasan Sumber Daya Alam, beban keluarga, pengangguran, pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Menurut antropolog Amerika, yang dikenal dengan konsep budaya kemiskinannya, Oscar Lewis, memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya . Keperluan-keperluan dasar misalnya: sandang, pangan dan papan.

Menurut Salim Emil (1986) masalah pokok yang dihadapi oleh pedesaan adalah kemiskinan dan keterbelakangan keadaan ini ditandai oleh: Pendapatan yang rendah dari sebagian penduduk pedesaan, dan terdapatnya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dalam usaha-usaha pembangunan sehingga disinyalir kondisi-kondisi tersebut kurang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan.

Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Sedangkan menurut European Union bahwa kemiskinan

sebagai kondisi seseorang dengan sumber daya (material, sosial, dan budaya) yang sangat terbatas

Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Menurut Amartya Sen, seperti dikutip dari Bloom dan Canning, 2001 (dalam Triariani), seseorang dikatakan miskin "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantive ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Manusia dapat lebih produktif tidak hanya membutuhkan pendapatan semata tetapi juga ketersediaan akses kesehatan dan pendidikan.

Kondisi kesehatan bagi masyarakat miskin pada umumnya tidak begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur (Suputra, 2016) Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerjaan yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja.

Para ahli menyatakan penyebab kemiskinan bersifat multidimensial, karena penduduk hanya bersumber dari factor internal, namun juga dari factor eksternal penduduk miskin Suyanto (1995), memberikan definisi kemiskinan structural sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Struktur atau tatanan kehidupan yang

seperti itu akan sangat susah untuk keluar dari belenggu tersebut tanpa bantuan pihak lain. Kemiskinan structural juga berkaitan dengan distribusi sumberdaya yang timpang. Penduduk yang memiliki sumberdaya tidak akan mengalami kemiskinan. Penyebab structural ini berkaitan dengan tatanan social terdapat ketidakadilan didalamnya, mengakibatkan sebagian masyarakat yang mengalaminya tidak memiliki akses atau gagal dalam mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh nyata adalah masyarakat yang hidup di daerah terpencil atau terisolir yang miskin akibat tempat tinggalnya yang terisolir (BPS, 2005)

Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013). Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang bersifat multisektoral, yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijaksanaan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan tersebut (Jember dan Swara, 2011). Indonesia terkenal dengan catatan tentang pengentasan kemiskinannya, tetapi garis kemiskinan nasionalnya adalah salah satu yang paling rendah di dunia (Arief dan Sumner, 2015). Kemiskinan seringkali dipahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari - hari (Windia, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Objek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013: 38). Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non-partisipan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, mempelajari jurnal, buku-buku, dokumen skripsi, tesis, dan melakukan 28 akses di badan pusat statistik (BPS) Bali serta dalam bentuk runtun waktu (time series). Jumlah pengamatan dalam penelitian ini berdasarkan data tahunan (time series) yang ada di Provinsi Bali, maka besarnya jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah sebesar 8 pengamatan karena data yang tersaji dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan rentan waktu dari 2012 – 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

### **1. Uji Normalitas**

Pada hasil uji yang dilakukan memperoleh hasil *Test Statistic* sebesar 0,085 dengan *Asymp.Sig.* sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih besar dari batas kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ) yang diterapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model uji telah memenuhi asumsi normalitas data.

### **2. Uji Multikolinearitas**

Pada hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* pada seluruh variabel bebas sudah lebih besar dari 0,1 dengan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model uji tidak ditemukan kasus multikolinearitas.

### **3. Uji Auto-Korelasi**

Hasil uji yang dilakukan menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,197 berada di antara DU dan 4-DU atau disebut sebagai daerah bebas autokorelasi.

### **4. Uji Heteroskedastisitas**

Pada hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan tidak ditemukan adanya perbedaan variance pada model uji.

### **5. Analisis Regresi Linier Berganda**

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 7,2535732 - 2,0607759X_1 - 0,0000142X_2 + 0,00771804X_3$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Tingkat Kemiskinan (variabel terikat)

X1= Pertumbuhan Penduduk (variabel bebas)

X2= Pendapatan Perkapita (variabel bebas)

X3= Pendidikan (variabel bebas)

Sesuai hasil perhitungan SPSS pada penelitian dengan variabel bebas yaitu pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, dan pendidikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

#### **6. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)**

Hasil uji sebesar 168,766 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  sehingga dapat dinyatakan hipotesis ( $H_0$ ) ditolak. Ini berarti Pertumbuhan Penduduk ( $X_1$ ), Pendapatan Perkapita ( $X_2$ ), Pendidikan ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ).

#### **7. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)**

##### **Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Hasil uji yang dilakukan menerangkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  jadi dapat dinyatakan bahwa hipotesis ( $H_0$ ) diterima. Ini berarti pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

##### **Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  jadi dapat dinyatakan bahwa hipotesis ( $H_0$ ) ditolak. Ini berarti pendapatan perkapita secara

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

### **Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  jadi dapat dinyatakan bahwa hipotesis ( $H_0$ ) ditolak. Ini berarti pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

### **IMPLIKASI HASIL PENELITIAN**

Fenomena kemiskinan masih menjadi hal penting bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, diantaranya Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan. Keterkaitan antara Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan terhadap kemiskinan sangat erat, kondisi tersebut dapat terlihat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Tindakan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan setiap warga negaranya.

Pertumbuhan Penduduk memberikan hasil pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka akan mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan suatu parameter kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat berkurang. Tingkat Pendidikan memberikan hasil negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan. Tidak berpengaruhnya pendidikan pada kemiskinan di dukung dengan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Apabila terbukanya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang sesuai maka dapat mengurangi angka kemiskinan. Kesempatan kerja yang tercermin dalam jumlah penduduk yang bekerja walaupun mengalami laju yang fluktuatif setiap tahunnya memberikan hasil yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sebaiknya pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan daerah harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Perkapita, dan Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah di Kabupaten/kota Provinsi Bali tetap harus fokus menjaga agar pertumbuhan penduduk yang tercipta di wilayahnya adalah pertumbuhan penduduk yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat mengurangi beban pembangunan di Kabupaten/kota Provinsi Bali dan dapat menjadi aset bagi perekonomian Kabupaten.kota Provinsi Bali itu sendiri.
- 2) Pemerintah dalam hal ini diharapkan memberikan bantuan yang lebih mengarah pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri, seperti bimbingan dan pelatihan tentang usaha kecil menengah dan juga bantuan modal, sehingga masyarakat dapat berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, kebijakan terkait perbaikan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil sehingga seluruh masyarakat mampu mengenyam pendidikan , sumbangan pendidikan ke masyarakat kurang mampu , atau pelatihan guru-guru sebagai tenaga pengajar yang dapat dikirim ke daerah-daerah terpencil.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel-variabel independen diluar penelitian yang penulis lakukan agar dapat mengetahui lebih jauh hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **REFERENSI**

- Addison, Hector. 2007. *Empirical Analysis of Poverty and Inequality in west Virginia*. Journal. [http://work.bepress.com/hector\\_addison/2](http://work.bepress.com/hector_addison/2). Diunduh 6 Desember 2013.
- Alit, Wiradyatmika A.A. Gde dan Ketut Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk

- Miskin di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Arndt, H. W. dan Sundrum, R. M. 2012. *Employment, Unemployment and Under-Employment*. . Bulletin of Indonesian Economic Studies, 16 (3), hal. 61 – 82.
- Arief Anshory Yusuf & Andy Sumner (2015) *Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:3, 323-348
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Chambers, Robert, (1983) < *Rural Development, Putting the Last First*, Longman:London
- Dadan Wardhana, Rico Ihle & Wim Heijman (2017) *Agro-clusters and Rural Poverty: A Spatial Perspective for West Java*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53:2, 161-186
- Dariwardani, Ni Made Inna. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 44305.
- Djayastra, I. K. dan Murjana Yasa, I. G. W. dan Purnama Margareni, N. P. T. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Piramida*, 12 (1), hal.101 – 110.
- Ghozali, Iman. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlik, Amri Amir & Hardiani. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 2.
- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 (2), hal. 120-129.
- I Made Anom Iswara, I. G. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2006-2011. *E-Jurnal EP Unud*, 492-501.
- I Made Tony Wirawan, S. A. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 546-560.
- Iswara, I Made Anom dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3(11), h: 492-501.
- Jeon,Shinyoung. 2013.Agricultural Transformation and the Escape from the Middle-IncomeCountry Trap: Challenges Facing Small Farmers in Indonesia in a Time of Green Restructuring.Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49 (3) : 383 – 384

- Kembar Sri Budhi, M. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali : Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1), hal. 1 - 6.
- Mankiw. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. M. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali.
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., SU, I., Wirathi, I. G. A. P., Rustariyuni, S. D., RUSTARIYUNI, S. D., ... & Dewi, N. P. M. 2014. Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(1).
- Marhaeni, A. A. I. N., & Yuliarmi, N. N. Pertumbuhan Penduduk, Konversi Lahan, dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Badung.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar.2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*.Jurnal Eksekutif. Vol.5 No.4, Agustus 2008.Lipi.Jakarata.
- Norton, Seth W. 2002. *Economic Growth and Provery: In Search of Trickle Down*. Cato Journal, 22(2), pp: 263-275.
- Osinubi, T. S. (2005). Macroeconometric analysis of growth, unemployment and poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social Review*, 249-269.
- Prastyadewi, M. I., Suman, A., & Pratomo, D. S. 2013. *Labor Absorption and Its Impact on Gross Regional Domestic Product*.
- Rahmawati. 2006.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacita Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Program Studi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor
- Rustariyuni, S. D., Aswitari, L. P., Ratha, P. W. S., & Nina, G. A. (2018). Open Unemployment in The Province of Bali. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 34(2), 473-485.
- Santoso, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani, “*Statistik Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*” Erlangga, Jakarta, 2007.
- Sarsiti dan Rakiman. 2011. *Jurnal “ Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kabupaten Sukoharjo* Periode 2002-2010.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. 10(1): h: 59-71.
- Sharp, Ansel M., Charles A. Register, and Paul W. Cirimes. 1996. *Economic Of Social Issues* (edisi ke 12). Richard D., Chicago: Irwin.
- Sitepu, R. K. & Bonar M. S. (2004). *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*.Dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=86291&val=245> Diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Tadoro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga*, Edisi ketujuh, Terjemah Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Thapa, S. B. (2013). Relationship between education and poverty in Nepal. *Economic Journal of Development Issues*, 148-161
- Tirtaraharja Umar. 2005. Pengantar Pendidikan. Rineka Cipta.
- Vincent, Brian.2009.*The Concept'Provery' towards Understanding in The Context of Development*. 2(2).

- Werner, Tammy L. 2015. *The War on Poverty and the Racialization of "Hillbilly" Poverty: Implications for Poverty Research*. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES). Volume 19; 3
- Windia, Wayan. 2015. *Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali)*. Piramida, 11 (1), hal.1 - 7.
- World Bank. (2010). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: Indopov.
- Yogi Swara dan Jember, Made.2010. *Kemiskinan di Bali*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.